# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

 Berbicara tentang hubungan internasional, tidak akan jauh dari berbicara pula tentang hubungan langsung antara dua negara atau lebih, yaitu mengenai keadaan antara negara-negara tersebut. Keadaan yang dimaksud itu adalah perang-damai dan dispekulasikan antar negara, karena ada sebuah peraturan dimana hanya negaralah yang berhak menyatakan perang atau damai. Kini, pada perkembangannya, perang dan damai dalam dunia internasional juga telah berkembang, dimana bukan hanya negara yang menjadi satu-satunya aktor yang mampu mempengaruhi situasi dunia internasional. Kelompok-kelompok pengganggu keamanan dalam suatu negara, juga merupakan aktor yang dipertimbanngkan.

 Pasca Perang Dingin terjadi banyak konflik internal, salah satu diantaranya adalah konflik internal di Somalia. Setelah rezim pemerintahan Said Barre diruntuhkan pada 1991 oleh sekumpulan pemimpin klan dan *warlord*yang hanya menginginkan Said Berre turun tanpa memikirkan bagaimana kelanjutannya. Hal ini berakibat negara tersebut mengalami perpecahan dan dilanda konflik internal yang berkepanjangan. Dalam penelitian ini, konflik di Somalia akan dibahas dari sudut pandang misi perdamaian yang dilakukan African Union di Somalia, yaitu AMISOM(*African Union Mission in Somalia*), yang bermula pada 2007.

 African Union merupakan organisasi regional internasional yang berada di Afrika dan membawahi beberapa organisasi regional yang ada di Afrika, seperti IGAD dan ECOWAS. African Union ini memiliki mekanisme dalam menghadapi masalah keamanan dan perdamaian karena Afrika merupakan benua yang memiliki jumlah konflik dengan prosentasi yang tinggi.

 Somalia adalah salah satu negara yang letaknya di kawasan tanduk Afrika *(Horn of Africa)*. Kawasan tersebut terletak di daerah barat Afrika dan berbatasan dengan Jazirah Arab. Kawasan itu memegang peranan penting dalam perdagangan dan transportasi internasional dunia, karena berbatasan langsung dengan Teluk Aden yang terhubung dengan laut merah, salah satu jalur laut untuk perdagangan yang sibuk. Tetapi, kawasan tersebut terkenal dengan tingkat kekacauan dan konflik yang sepertinya tidak kunjung selesai. Eritrea, Ethiopia, Kenya, Republik Djiboutidan Somalia merupakan negara-negara yang paling tidak pernah terlibat konflik di daerah. Dalam artian walaupun adakonflik, namun itensitasnya tidak tinggi.[[1]](#footnote-2)

 Hingga saat ini, Somalia adalah salah satu negara yang berkonflik sangat kompleks. Konflik-konflik internal yang terjadi adalah adanya perang sipil yang dimulai sejak 1991, antara pemerintah Somalia dengan beberapa kekuatan pemberontak. Konflikini cukup rumit, karena di Somalia tidak hanya terjadi konflik internal namun juga konflik internasional dengan adanya serangan yang dilancarkan oleh negara-negara tetangga, dan masih banyak faktor lain yang disebabkan oleh konflik internal. Terjadinya persebaran masalah yang muncul, seperti maraknya pembajakan di perairan Somalia bahkan kasus Al-Qaeda yang bergabung dengan gerilyawan Al-Shabab[[2]](#footnote-3), membuat konflik ini menjadi semakin rumit dan berimbas kepada dunia internasional.

 Dalam konflik internal ini, kita bisa melihat bahwa adanya hal menarik, ini merupakankonflikyang tidak dapat diselesaikan oleh negara itu sendiri, sehingga membuka mata dunia internasional dan tidak mau harus bertindak untuk membantu pemerintahan Somalia, guna mencegah konflik yang terus berkepanjangan dan pada akhirnya meluas sehingga terjadi *civil over conflict* ke daerah-daerah disekitar Somalia. Apalagi melihat bahwa perairan di sekitar Somalia merupakan perairan penting untuk perdagangan dunia, karena kapal-kapal dari Asia, jauh lebih dekat untuk ke Eropa bila melewati terusan Suez. Untuk mencapai terusan Suez, kapal-kapal harus melewati perairan Somalia. Dikarenakan adanya pemberontakan di Somalia untuk ditukar dengan tebusan uang. Disinyalir, uang-uang tersebut digunakan untuk membiayai gerakan dalam konflik internal di Somalia. Dari hal ini, kita bisa melihat adanya gangguan keamanan ke dunia internasional karena konflik internal ini.

 Meninjau kemungkinan masalah konflik yang ada di Somalia berpotensi menjadi masalah internasional, dunia internasional bergerak untuk membantu terciptanya perdamaian di Somalia. Organisasi internasional seperti PBB, negara-negara lain, NGO, dan bahkan individu memberikan bantuan untuk membantu terciptanya perdamaian di Somalia.

 Namun, bukan berarti bahwa proses penciptaan perdamaian di Somalia itu mudah. Konflik Somalia sangat rumit dan banyak aspek yang perlu diperhitungkan. Tiga dari misi PBB yang telahdilaksanakan pada awal sekitar1990-an tidak mampu membawa perdamaian. Misi-misi tersebut adalah UNISOM I (*United Nations Operation in Somalia I*), UNITAF (*UnifiedTask Force),* dan UNISOM II (*United Nations Operation in Somalia II*). Misi terakhir adalah UNISOM II selesai pada Maret 1995. Namun konflik tetap terjadi di Somalia higga saat ini.

 Pada perkembangannya, konflik Somalia terus mengalami perubahan, meskipun pada dasarnya sama, yaitu perang saudara. Tahun 2004, muncul TFG(*Transitional Federal Goverenment)* yang dibentuk di Nairobi, Kenya, TFG ini adalah pemerintahan Somalia yang telah diakui secara internasional, dan mendapat dukungkan dari PBB, AU, dan Amerika Serikat. TFG ini memerangi kelompok Al-Shabab agarbisa mendapatkan kontrol penuh atas bagian selatan Somalia. Dibagian utara Somalia, terdapat dua daerah lepasan, yaitu Punland, dan Somaliland. Tetapi, secara umum, kondisi di utara Somaliajauh lebih baik dari pada bagian selatan Somalia.

 Meskipun sudah tercipta pemerintahan yang sah dan diakui secara internasional, rupanya pemberontakan masih terjadi, sehingga transisi menuju pemerintahan yang mampu berdiri sendiri masih terhambat. Dengan adanya dukungan dari PBB, AU dan Amerika Serikat, proses menuju transisi, menjadi jauh lebih baik dan dimungkinkan.

 Di pihak lain, kita bisa melihat mengenai perkembangan *African Union* belakagan ini. *African Union* terbentuk pada 9 Juli 2002[[3]](#footnote-4). AU merupakansalah satu aktor regional yang berada di kawasan Afrika. Dalam perkembangannya AU ini memiliki fungsi sebagai keamanan, dan tentu saja berhubungan langsung dengan keamanan di kawasan, berusaha untuk menjaga keamanan dan stabilitas dikawasan Afrika, dan salah satuya adalah Somalia. Karena itu, AU meluncurkan misi AMISOM yang berfokus di Somalia.

 AMISOM (*Africa Union Mission in Somalia)* adalah sebuah misi bentukan dari AU untuk Somalia. Mandat AMISOM sendiri adalah untuk menyediakan dukungan ke TFIs (*Transitional Federal Institutios*)dalam upaya menuju stabilitas situasi di negara dan pemajuan dialog dan rekonsiliasi, untuk memfasilitasi kebutuhan bantuan kemanusiaan, dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk stabilitas jangka panjang, rekontruksi dan perkembangan di Somalia[[4]](#footnote-5) TFLs ini adalah sebuah institusi yang dibentuk sebagai sebuah lembaga pemerintahan transisi yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan tetap di Somalia. TFG merupakan cabang eksekutif dari TFLs. Dan untuk mencapai tujuannya, TFLs perlu didukung oleh AMISOM karena keamanan di Somalia masih dalam keadaan yang berbahaya.

 Dalam perkembangannya AMISOM adalah misi perdamaian ketiga dari *African Union*. Sebelum misi di Somalia, AU menyelenggarankan misi perdmaian di Burundi dan Sudan. Misi AMISOM ini ada kaitannya dengan IGASOM*(Inter Government Authority on Davelopment PeaceSupport Mission in Somalia*), lebih tepatnya adalah kelanjutan atau perbaikan. Sebelum AMISOM ini di mandatkan, sudah ada IGASOM yang telah berhasil dari IGAD. Namun karena konflik, pertentangan dari aktor yang berperang di Somalia, dan konflik internal yang terjadi di Sudan yang menjanjikan untuk menyumbang tentara untuk IGASOM, akhirnya membuat IGASOM tidak dapat berjalan dan selebihnya diambil alih oleh AU. Salah satu yang menyebabkan mengapa AU yang akhirnya melaksanakan misi damai, dapat ditarik dari negara dengan cakupan negara yang lebih luas karena AU memiliki jumlah negara anggota yang lebih besar.

 Awalnya, mandat AMISOM adalah selama enam bulan dan kemudian misi ini akan berubah menjadi misi PBB. AMISOM ini sebenarnya tidak terdiri dari tentara sepenuhnya, tapi ada juga yang bersal dari sipil, dan sisi militer negara-negara yang menyumbang tentaranya adalah Uganda (1600 tentara), Burundi (1500-1600 tentara), Nigeria (850 tentara) dan Ghana (350 tentara)[[5]](#footnote-6). Meskipun begitu, jumlah ini tidak dapat dipenuhi secara penuh pada awal-awal misi karena kesulitan teknis.

 AMISOM ini adalah salah satu misi yang didukung oleh PBB. Hal ini karena walaupun misi AMISOM ini didasarkan pada AMIB*(The African Mission in BurundiConcept*),karena kebanyakan negara anggota AU adalah negara-negara yang mimiliki sumber daya yang lemah, maka AIMB *Concept* ini tidak efektif, dan pada akhirnya bukannya mandiri malah memerlukanbantuan dari *partner* AU untuk dukungan logistik,peralatan, transportasi udara, dan pelatihan. Dan dari sisi lain, banyak pula pihak yang rupanya menyumbang untuk misi AMISOM ini.

 Terlepas dari terlilhat kurang siapnya AMISOM, pada kenyataannya AMISOM telah berhasil dan terus bertahan di Somalia serts membantupemulihan perdamaian, hingga pada satu titik, akhirnya Mogadishu bisa direbut kembali dari gerilyawan Al-Shabab pada tahun 2011. Sesudah itupun, AMISOM masih terus berjalan karena perdamaian belum tercapai hingga tahun 2011.[[6]](#footnote-7)

 Dengan ini kita mampu melihat adanya dua hal yang menarik. Yang pertama adalah konflik Somalia adalah salah satu konflik yang *protracted* dan sangat rumit karena banyaknya faktor yang ada di dalam konflik tersebut. Banyaknya *warlord*, adanya keterlibatan gerilyawan Al-Shabab dan Al-Qaeda, lemahnya pemerintahan karena institusi yang lemah, masalah sosial yang berujung karena maraknya pembajakan di Teluk Eden merpakan beberapa faktor dari konflik Somalia ini. Tidak adanya pihak yang mau mengalah mengakibatkan konflik menjadi berlarut-larut. Kondisi seperti ini membuat adanya kemungkinan melubernya konflik dalam artian persebaran konflik dan mutasi konflik menjadi masalah lain yang disebabkan konflik tersebut, seperti menjadi masalah sosial dan terorisme.

 Kedua adalah semua misi yang dilakukan tidak berhasil. PBB dan UNITAF bentukan Amerika Serikat tidak mampu meredakan konflik Somalia. Jangankan perdamaian, konflik malah berkembang dengan masuknya aktor baru seperti Al-Qaeda dan gerilyawan Al-Shabab. Namun pada akhir 2000-an, setelah terbentuk AU, dan semakin kuatnya konsep *regional peacekeeping*.

 Pada awal mula misi AMISOM diluncurkan, AMISOM mendapat mandat untuk menyediakan dukungan ke TFIs (*Transitional Federal Insititutions)* dalam upayanya menuju stabilitas negara dan kemajuan dialog dan rekonsiliasi, untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan bantuan kemanusiaan, dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk stabil dalam jangka panjang, rekontruksi dan perkembangan di Somalia. Dari mandat tersebut, kita berusaha untuk melihat bagaimana hasil misi AMISOM ini dan faktor apa saja yang menyebabkan kesuksesan perdamaian ini.

 Maka pada penelitian inikita mencoba melihat hal-hal apa saja yang membuat AU dapat melaksanakan misi perdamaian dengan relatif baik. Bagaimana perkembangan AU sebagai sebuah organisasi regional internasional dalam menangani masalah keamanan di Afrika, dengan melihat studi kasus konflik Somalia. Untuk menentukan misi perdamaian tersebut, dilakukan pengukuran keberhasilan dari dua hal, yaitu dari sisi tugas yang dimandatkan ke AMISOM, dan dari kriteria Pushkina.

 Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah keberhasilaan misi AMISOM, diambil pada tahun 2011 karena terdapat titik yang penting dalam upaya *peace building*dimana Mogadishu berhasil dikontrol sepenuhnya dari sebelumnya ada kekuatan pemberontak yang menguasai Mogadishu.[[7]](#footnote-8) Dengan demikian perlu untuk melihat mengapa misi AMISOM ini bisa dibilang relatif berhasil. Untuk memastikan hal tersebut, digunakanlah analisa mengenai kinerja AMISOM dan juga menggunakan kriteria Pushkina.

## Identifikasi Masalah

 Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis membuat identifikasi masalah ini dalam beberapa pertanyaan berikut:

Bagaimana langkah-langkah AMISOM dalam upaya menciptakan perdamaian di Somalia?

Bagaimana AMISOM menyikapi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani konflik di Somalia?

Apakah AMISOM berhasil menjalankan misi penciptaan perdamian di Somalia?

### Pembatasan Masalah

 Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan yang jelas, yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan faktor mana saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan. Mengingat begitu kompleks dan luasnya masalah yang akan diteliti maka penulis akan membatasi masalah dengan fokus pada peran AMISOM dalam perdamaian di Somalia tahun 2007-2016.

### Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mempermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:**“Bagaimana peran AMISOM (*African Union Mission in Somalia*) dalam perdamaian di Somalia?”.**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

 Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu sebagai syarat bagi peneliti untuk menempuh jenjang Strata Satu ( S1 ), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung Jurusan Hubungan Internasional, selain itu tujuan penelitian ini berkaitan dengan penelaahan, pemahan serta pengembangan bidamg yang sedang di teliti. Antara lain sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana kinerja dari AMISOM dalam upaya menciptakan perdamaian di Somalia.

Untuk mengetahui bagaimana AMISOM menyikapi konflik pelik di Somalia.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan AMISOM dalam upaya menciptakan perdamaian di Somalia.

### Kegunaan Penelitian

 Berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliltian ini diharapkan dapat memberika manfaat bagi pengembangan suatu ilmu, berkaitan dengan tema penellitian maka penelitian ini terbagi menjadi teoritis dan praktis, yang secara umum diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi perkembangan ilmu hubugnan internasional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam bidang hubungan internasional, terhadap pengaruh AMISOM dalam stabilitas di Somalia.

Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman pemikiran dan bahan evaluasi bagi penelitian di masa mendatang.

## Kerangka Konseptual dan Hipotesis

### Kerangka Konseptual

 Dalam upaya menjawab pokok-pokok permasalahan serta menarik hipotesa, maka penulis dalam karya penelitian ini akan didukung oleh beberapa pendekatan-pendekatan, konsep dan teori yang relevan dengan tema bahasan penelitian ini.

 Dalam bahan yang pertama, dalam buku *Peacekeping and the Internationsl System,* MacQueen memaparkan mengenai kegagalan misi perdamaian Somalia yang dilakukan PBB.[[8]](#footnote-9)Dalam bab berjudul *Peacekeeping in Stateless Terrain*, MacQueen menjelaskan mengenai Somalia, dan sejarah terbentuknya, sejarah konflik, hingga perekembangan konflik dimana PBB terlibat dan akhirnya dinyatakan gagal. MacQueen dalam tulisannya memaparkan bahwa PBB mengalami kesulitan karena pada dasarnya ada satu sarat yang sulit untuk terpenuhi, yaitu adanya *host countryconsent.* Tidak seperti Kongo dimana ada negara dan pememrintahan yang bisa diajak untuk bernegosiasi, sedangkan Somalia tidak memiliki pemerintahan. Hal ini dikarenakan banyaknya fraksi dan kehadiran militer untuk membantu UNISOM dilhat terlalu lemah kehadirannya, diharapkan agar para fraksi mau untuk turun dan bernegosiasi. Namun kenyataannya, walaupun tujuan membantu UNISOM mengamankan bantuan pangan berhasil, tetapi pimpinan militer di Amerika Serikat tidak terlalu tertarik dengan misi ini, dan menginginkan misi ini untuk membatasi peran UNITAF kedistribusi bantuan kemanusiaan hanya daerah yang dituju. UNITAF jugahanya memliki durasi singkat dan sebisamugkin mengembalikan tanggung jawab ke UNISOM dan pada kesempatan pertama yang memungkinkan. Hal ini membuat misi UNITAF selesai karena memang parameternya dibuat mudah, tetapi tidak ada pelucutan senjata yang membuatmisi UNISOM II menjadi sangat sulit karena keadaan Somalia setelah ditinggalkan oleh UNITAF selesai, misi UNISOM II diluncurkan. Masalah utama pada misi UNISOM II ini cukup banyak. Salah satunya dengan rumitnya rantai komando dalam misi ini. Pada akhirnya misi ini tidak berhasil karena kekerasan masih terus terjadi, dan situasi tidak kondusif bahkan semakin rumit dengan munculnya banyak fraksi di Somalia. Misi UNISOM II ini akhirnya ditarik mundur sepenuhnya pada 31 Maret 1995, sesuai dengan mandat PBB, yaitu resolusi 954.[[9]](#footnote-10) Pelajaran yang diambil dalam tiga misi diatas adalah perlu adanya komitmen penuh dari semua pihak dalam misi perdamaian. Misi perdmaian yang dilakukan juga harus konsisten dari awal dengan tujuan yang telah ditetukanAMISOM adalah misi perdamaian setelah UNISOM II gagal di Somalia. Dengan memlihat mengenai apa yang telah dilakukan oleh AMISOM dan perkembangan apa yang terjadi, penelitian ini dapat merumuskan apa yang membuat misi perdamaian berhasil di negara yang keadaannya sangat sulit seperti di Somalia. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk dapat melihat mengenai bagaimana organisasi regional melaksanakan misi perdamaian.

 Penelitian kedua yang akan kita lihat adalah seperti yang tertulis dalam artikel yang ditulis oleh Tony Karbo, *Peace Building in Africa*, dalam *PEACE & CONFLICT IN AFRICA* yang diedit oleh David J.Francis. dalam penelitiannya Karbo menuliskan mengenai *peacebuilding* di Afrika, bahwa Afrika ini adalah benua laboratoriius kemanuasiaan, dimana nyaris semua hal bisa terjadi disini berkenaan dengan perdamaaian. Afrika juga sudah lama mengalami konflik, dan penelitian sebelumnya menunjukan bahwa cara yang dilakukan kurang benar, karena tidak membangun dari bawah, namun menenkan konflik dari atas. Hal ini searah dengan pemikiran liberal peace. Pada dasarnya hubungan penelitian dengan penelitian mengenai AU adalah melihat konflik di Afrika perlu pendekatan yang berbeda, dimana perlu pembangunan dari bawah.[[10]](#footnote-11) Meskipun pada artikel Karbo berfokus pada *peacebuilding*, beberapa ide dalam tullisannya bisa digunakan dalam penelitian AU. Mirip, karena pada dasarnya, metode yang digunakan dalam perdamaian bisa diterapkan dalam misi AMISOM. Perlunya pembangunan institusi, seperti yang dianjurkan oleh pemikiran *liberal peace*, perlu diterapkan, karena Somalia, adalah negara yang memiliki pemerintahan yang lemah. Disini, kita bisa melihat adanya kondisi yang mirip dengan apa yang diuraikan oleh Karbo dalam tulisannya.

 Penelitian mengenai AMISOM selanjutnya adalah tulisan Cecilia Hull dan Emma Svensson yang berjudul *African Union Mission in Somalia* (AMISOM) *Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges*.[[11]](#footnote-12) Dalam tulisannya , Hull dan Svensson memaparkan mengenai misi AMISOM yang merupakan misi perdamaian ketiga AU. Mereka berdua melihat AMISOM sebagai sebuah misi yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan misinya, dikarenakan kurangnya sumber daya, kapasitas dan pembiayaan, dan juga kurangnya kapasitas institusional untuk mengatur operasi. Dalam hal ini, sebenarnya AMISOM bisa dikatakan tidak mampu dan kesulitan untuk melaksanaan misi perdamaian di Somalia. Namun, tulisan Hull dan Svensson adalah tulisan yang pada tahun 2008, dimana misi AMISOM dimulai pada tahun 2007. Mungkin yang dilihat oleh Hull dan Svensson adalah misi AMISOM yang masih prematur. Masih banyak kekurangan disana sini.

 Penelitian AMISOM yang dilakukan, pada dasarnya adalah penelitian lanjutan dari penelitian Hull dan Svensson. Setelah 2008, banyak hal yang terjadi dengan AMISOM yang membuatnya berhasil membuat sebuah pencapaian dengan merebut Mogadishu sepenuhnya untuk TFG. Hal inilah yang kemudian akan kita lihat sebagai sebuah penambahan dan kritik terhadap Hull dan Svensson.

 Penelitian AMISOM yang keempat adalah tulisan Tim Murithi yang berjudul *The African Union’s Foray into Peacekeeping: Lessons from the Hybrid Mission in Darfur*, yang dimuat dalam *Journal of peace, Conflict and Davelopment, Issue 14, July 2009*.[[12]](#footnote-13) Dalam tulisannya, Murithi memaparkan mengenai bagaimana misi-misi perdamaian AU, terutama dari Darfur. Namun dalam tulisannya ini, Murithi juga menjelaskan mengenai AMISOM. Murithi menjelaskan mengenai latar belakang kenapa AMISOM akhirnya diturunkan sama sekali. Murithi dalam membahas mengenai AMISOM lebih berfokus mengenai teknis dan bagaimana pelaksanaan misi seperti yang ada di Burundi, yaitu AMIB (African Union Mission in Burundi).

 Untuk dapat mempermudah proses penelitian dan pembahasan, maka diperlukan dasar pemikiran yang dapat diperoleh dari konsep atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian. Dimanakonsep-konsep dari para ahli tersebut akan digunakan sebagai landasan penulis dalam mengemukakan kerangka pemikiran, yang diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

 Dalam usaha untuk menjawab pertanyaan permasalahan, kita akan menggunakan konsep organisasi internasional dan misi perdamaian. Kerangka pemikiran yang digunakan sesuai dengan masalah yang akan diteliti yakni Bagaimana AMISOMrelatif berhasil dalam misinya.

 Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep Organisasi Internasional. Organisasi internasional adalah sebuah orgnisasi yang terbentuk dari banyak negara. Sebenarnya masih banyak perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan Organisasi Internasional. Dalam bukunya Clive Archer mencontohkan, kebingungan antara apa yang disebut dengan Organisasi Internasional dan Institusi Internasional menunjukan bahwa dengan melihat perkembangan sejarah mengenai Organisasi Internasional, maka ada beberapa pus yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Organisasi Internasional, Anthony Judge, menunjukan ada beberapa kriteria yang dapat digunakan yaitu :

Tujuan pendirian harus mengandung aspek internasional dengan fokus perhatian mencakup kepentingan minimal 3 negara.

Keanggotaan berupa partisipasi individu atau kolektif dengan hak suara dan keanggotaan bersifat terbuka tidak boleh dikuasai oleh satu negara.

Konstitusi harus disusun dalam upaya pembentukan struktur formal setiap anggota memiliki hak secara periodik untuk memilih badan-badan operasional dan para pejabatnya.

Memiliki markas yang permanen.

Pejabat Organisasi Internasional harus dari berbagai bangsa

Kontribusi anggaran atau dana dari negara anggota.

Tidak di perkenankan mencari keuntungan dalam keanggotaan Organisasi Internasional karena Organisasi Internasional buka tempat untuk berbisnis.

Kerjasama aktifitas.

Adanya pertemuan berkala guna membahas kebijakan dan aktifitas.[[13]](#footnote-14)

 Selain Anthony Judge, ada banyak pendapat lain mengenai syarat suatu Organisasi Internasional. Namun, secara umum ada tiga bagian penting dalam melihat suatu organisasi, apakah pantas untuk disebut Organisasi Internasional atau tidak. Tiga hal tersebut adalah keanggotaan, tujuan, dan struktur.

 Keanggotaan suatu organisasi untuk dapat disebut sebagai sebuah organisasi internasional adalah harus terdiri dari dua atau lebih negara yang berdaulat. Tujuan oraganisasi adalah untuk mengejar menemukan kepentingan bersama anggota-anggota, organisasi harus memiliki struktur yang formal yang berkelanjutan yang dibuat dengan kesepakatan atau dokumen konstituen.

 Organisasi intenasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang dibentuk dengan persetujuan antara angtota (pemerintah atau non pemerintah) bertujuan untuk mendapatkan kepentingan bersama negara anggota.[[14]](#footnote-15)

 Mengenai beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melihat organisasi internasional secara umum. Namun untuk melihat permasalahan dalam penelitian ini, klasifikasi akan dilihat dari cakupan wilayah. Ada dua jenis, yaitu: global (*unuversalism)* dan regional (*regionalism*). Global adalah organisasi internasional yang cakupannya mengglobal atau mendunia contoh dari organisasi ini adalah PBB. Organisasi internasional regional adalah oraganisasi internasional yang cakupannya hanya sebatas pada satu regional atau kawasan saja, contohnya adalah AU (*African Union*).

Misi perdamaian adalah upaya dunia internasional untuk mengatasi konflik. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran konflik yang terjadi akan mempengaruhi dinamika internasional yang mengakibatkan ancaman keamanan terhadap stabilitas kawasan.

Konsep misi perdamaian ini mulai muncul sejak PBB terbentuk, dengan adanya ketentuan tentang upaya untuk menciptakan perdamaian di piagam PBB. Namun pada awal terbentuknya PBB, misi perdamaian masih kurang dilakukan, karena masih banyak negara-negara yang belum merdeka. Misi perdamaian mulai banyak dilakukan pada masa Perang Dingin. Setelah Perang Dingin selesai, misi perdamaian banyak dilakukan, dengan ditambahkan perhatian terhadap masalah kemanusiaan. Namun pada masa itu juga misi perdamaian sempat tergeser karena konflik-konflik yang terjadi, konflik yang terjadi setelah masa Perang Dingin ialah konflik internal. Salah satu yang berpengaruh dalam konsep misi perdamaian ini adalah **Boutros-Boutros Ghali**, sekjen PBB. **Ghali** menulis mengenai *An Agenda For Peace* yang membahas mengenai masalah perdamaian secara mendalam.[[15]](#footnote-16)

Konsep misi perdamaian secara umun terbagi menjadi empat jenis, yaitu : *preventive doplomacy, peacemaking, peacekeeping*dan  *peacebuilding* konsep misi perdamaian pada dasarnya bertujuan untuk mencapai perdamaian. Namun berbeda tingkatan sesuai dengan konflik yang dihadapi bila keadaan sudah sangat mendesak, dimana pelanggaran yang besar terjadi dan kejahatan kemanusian ada dalam konflik tersebut akan dilakukan intervensi dengan proporsional dengan mempertimbangkan semua sisi konflik.

 Dalam membahas mengenai upaya *peacekeeping*, masih belum jelas apa yang dimaksud dengan *peacekeeping.* Dalam *Handbook, Internatioal Peace Academy* mendefinisikan *peacekeeping*sebagai pencegahan, penahanan, moderasi dan terminasi dari peperangan dalam negara, melalui perantara intervensi damai pihak ketiga yang diorganisasi dan diarahkan secara internal menggunakan kekuatan pasukan multinasional, polisi dan sipil untuk mengembalikan dan menjaga perdamaian. Beberapa definisi sedikit berbeda namun secara umum tetap sama.

Dilihat mengenai konsep *peacekeeping*seperti yag dilakukan oleh PBB. Menurut **Boutros Ghali** dalam *An Agenda for Peace, Peacekeeping* didefinisikan sebagai berikut:

***“deploymentof a United Nations Presence ini the filed, hithero with the consent of all the parties concerned, normally, involving United Nations military and police personnel and freaquetly civilans as well. Peacekeeping is theniquethat expands and possibitites for both the prevention of conflic and the making of peace”***

 Boutros Ghali, melihat upaya kontrol konflik, ada empat kegiatan yang dilakukan PBB, yaitu *preventive diplomacy, peacemaking, peacekeping and peacebuilding*. Namun, pada perkembangannya ada satu tahap lagi yang diusulkan oleh Ghali dalam upaya kontrol konflik ini. Yaitu *peace enforcement* karena kurang kuatnya *peacekeeping* bila melihat faktor harus adanya penempatan perdamaian pasukan PBB. Dengan *peace enforcement*, faktor persetujuan ini diusulkan untuk sedikit dikesampingkan, agar kekuatan PBB lebih untuk menciptakan perdamaian.[[16]](#footnote-17)

 *Preventive diplomacy* dilakukan sebagai tahapan pertama dalam misi perdamaian, karena dengan *preventive diplomacy*, tidak diperlukan intervensi dan kekuatan senjata, sehingga ini adalah cara paling aman dan menguntungkan untuk semua pihak. *Preventive diplomacy* dilakukan pada saat awal-awal terjadi pertikaian dimana konflik masih belum terjadi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan dari pertikaian menjadi konflik bersenjata. Tindakan ini memiliki karakteristik tertentu yaitu bergantung kepada peringatan mengenai resiko munculnya konflik, membutuhkan informasi mengenai sebab dan sifat konflik untuk menentukan tindakan yang diperlukan, dan membutuhkan izin pihak yang bertikai untuk melakukan tindakan tersebut.[[17]](#footnote-18)

 Bila *preventive* sudah dilakukan dan konflik masih terjadi maka dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu *peacekeeping, peace enforcement, peacemaking* dan *peacebuilding.*

 *Peacekeeping* secara umum adalah tindakan untuk menjaga perdamaian, dimana konflik sudah muncul, namun dilakukan tindakan untuk mencegah pihak yang bertikai untuk saling menyerang dengan membuat penghalang. Penghalang yang dimaksud ialah pasukan nertal dari PBB atau sekelompok negara netral. Pasukan ini hanya memisahkan pihak-pihak yang berkonflik.

 *Peace enforcement* ialahpenegakan perdamaian yang memerlukan penggunaan angkatan bersenjata untuk memisahkan kombatan dan menciptakan gencatan senjata yang tidak ada. Angkatan juga dapat digunakan untuk menciptakan tujuan damai lainnya seperti *safe haven* untuk korban permusuhan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada tindakan tegas untuk mencegah gencatan senjata agar tidak dilanggar atau untuk mengembalikan gencatan senjata yang gagal.[[18]](#footnote-19)

 *Peacemaking* adalah proses untuk membuat penyelesaian antara pihak yang berkonflik. Walaupun bisa dilakukan antara kedua pihak yang bertikai . proses ini juga dilakukan dengan bantuan monderator pihak ketiga yang netral dan membantu terbentuknya penyelesaian perdamaian. Namun, setelah proses-proses penyelesaian konflik ini dilakukan dan berhasil, masih ada satu proses lagi, yaitu *peacebuidling.*

 *Peacebuilding* adalah sebuah proses normalisasi hubungan dan rekonsilasi perbedaan antara pihak yang berkonflik. Proses ini pada dasarnya adalah sebuah proses yang berupa agar perdamaian yang tercipta adalah perdamaian yang tahan lama dan konflik tidak terjadi.[[19]](#footnote-20)

 Dari sini kita melihat adanya kekurangan dalam perumusan *peacekeepingoperation*, karena pada kenyataannya masih perlu didebatkan mengenai pihak yang berperang terhadap penempatan pasukan penjaga perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan selanjutnya, konsep perdamaian seperti apakah yang akan terlihat dalam misi AU di Somalia. Bagaimana organisasi regional melaksanakan misi perdamaian, akan dibahas dalam konsep selanjutnya, yaitu kosep *regional peacekeeping*.

 Dalam melihat *peacekeeping*, kita juga akan melihat mengenai keberhasilan misi perdamaian, banyak faktor yang menjelaskan mengenai suksesnya misi perdamaian. Pada proses *peacekeeping* di Somalia direbutnya Mogadishu dari kelompok Al-Shabab, AMISOM yang tengah mendukung TFG melatih para polisi dan tentara Somalia yang sebelumnya telah lumpuh akibat pemberontakan. AMISOM tidak hanya menyediakan tentara dari negara-negara African Union, tetapi juga melatih kembali para polisi dan tentara Somalia, karena ditakutkan suatu hari nanti AMISOM ditarik dari Somalia dan pihak dari Somalia dapat bertahan. Dengan pelatihan tersebut, akhirnya AMISOM dan para tentara Somalia bisa memasuki Mogadishu dan mengusir kelompok Al-Shabab. TFG yang sebelumnya bertempat diluar negeri, kini Mogadishu menjadi ibukota Somalia.

 Dalam setiap misi harapanya adalah misi tersebut berhasil. Namun apa yang menjadikan misi tersebut tidak berhasil, sampai batas manakah sebuah misi bisa dikatakan berhasil, kriteria-kriteria keberhasilan misi perdamaian menjadi satu topik yang selalu diperdebatkan dalam kajian perdamaian. Hal ini disebabkan antara satu ilmuan dengan ilmuan lain memerdebatkan mengenai sampai batas mana misi perdamaian ini masuk. Ada yang dinyatakan berhasil melaksanakan misinya, namun tidak berhasil menciptakan perdamaian dalam situasi konflik. Hal ini terjadi contohnya UNITAF di Somalia.[[20]](#footnote-21)

 Misi UNITAF ini adalah sebuah misi yang ditugaskan untuk memberikn dukungan kepada UNISOM, agar UNISOM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam kondisi yang aman dan kondusif. Misi ini dinyatakan berhasil saat misi tersebut ditarik, karena beberapa pengamat melihat misi tersebut sudah berhasil melaksanakan mandatnya. Namun nyatanya UNISOM II yang ditinggalkan oleh UNITAF tidak dapat melaksanakan misinya dengan baik dan dinyatakan gagal. Perdamaian di Somaliapun tidak terjadi paska misi-misi PBB tersebut selesai. Disini kita melihat mengenai keberhasilan UNITAF dalam mandatnya, namun kegagalan namun kegagalan dalam menciptakan perdamaian di Somalia.

 Oleh karena itu, selain satu hal yang penting adalah menentukan sebenarnya bagaimana sebuah misi perdamaian itu bisa dikatakan berhasil. Dalam melihat AMISOM, pemaparan Pushkina mengenai kriteria suksesnya misi perdamaian akan kita pakai.

 Dalam tulisan Darya Pushkina dia menjelaskan mengenai kriteria kesuksesan misi perdamaian.[[21]](#footnote-22) Dia memaparkan mengenai perdebatan dalam menentukan kriteria misi perdamaian. Hal ini sebabkan karena tidak adanya satu tataran baku mengenai kriteria keberhasilan sebuah misi perdamaian. Menurut Anthony Lake**,** pemenuhan mandat misi tersebut adalah sebuah hal yang sangat penting, karena berhubungan dengan sebuah kesuksesan misi secara politik yang berdampak langsung kepada keberhasilan secara keseluruhan.[[22]](#footnote-23)

 Menurut Pushkina, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam melihat misi perdamaian, kriteria pertama adalah pembatasan konflik di negara tempat konflik terjadi. Kriteria kedua adalah pengurangan penderitaan manusia. Kriteria ketiga adalah pencegahan penyebab konflik diluar negara yang mengalami konflik untuk menjaga keamanan regional. Kriteria keempat mengupayakan resolusi konflik.

 *Regional peacekeeping* adalah konsep yang muncul dalam bidang perdamaian setelah masa Perang Dingin selesai. *Regional peacekeeping* adalah konsep yang dibentuk oleh PBB yang memperkerjakan organisasi regional untuk melakukan operasi penjaga perdamaian untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai. Karena organisasi semacam itu dapat bereaksi lebih cepat dan memililki pemahan konflik yang lebih baik dari pada masyarakat internasional secara keseluruhan.[[23]](#footnote-24)

 Pada dasarnya ada beberapa kesamaan antara misi perdamaian sebelum dan sesudah Perang Dingin. Misi perdamaian paska Perang Dingin, memasukan kepentingan *human security* bila sebelum Perang Dingin misi perdamaian lebih didorong oleh prioritas politik dan militer. Maka setelah Perang Dingin lebih didominasi oleh sebab kemanusiaan. Maka sesudah Perang Dingin misi perdamaian mulai bercampur antar metode *peacekeeping* dan *peace enforcement*. Hal inilah yang membedakan antar misi perdamaian sebelum masa Perang Dingin dan sesudah masa Peran Dingin. Paska Perang Dingin lebih mengarah ke regional karena banyaknya konflik internal. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Shawdimana Shaw menunjukan bagaimana banyaknya permintaan akan misi perdamaian paska Perang Dingin membuat pasukan PBB saat itu Boutros Ghali mengusulkan misi perdamaian alternatif dimana organisasi regional didorong berperan besar dalam misi perdamaian, usul ini dapat dilihat dalam *An Agenda for Peace* tulisan Boutros Ghali.[[24]](#footnote-25) Misi perdamaian saat ini kita melihat bahwa *human security* adalah sebuah isu yang sangat penting. Banyak misi perdamaian yang dilakukan atas mempertimbangkan kemanusiaan, intervensi yang sebelum masa Perang Dingin sangan di hindari karena adanya ketakutan untuk melanggar kedaulatan suatu negara. Perdebatan mengenai hak untuk mengintervensi dan kedaulatan negara sendiri adalah perdebatan yang panjang. Tapi tidak untuk melihat kasus ini, kita akan mencoba menggunakan konsep *reponbility to protect* yang mulai muncul juga pada paska Perang Dingin.

 *Responbility to protect* menurut Vijay Mehtaadalah semua konsep untuk intervensi terhadap suatu negara oleh komunitas internasional untuk mencegah terjadinya genosida, pembersihan etnis, pembunuhan masal atau pelanggaran hak asasi manusia di negara yang tidak mau atau tidak mampu menghentikannya. Pada saat itu juga, komunitas internasional mempunyai kewajiban bersama untuk mengambil tindakan apapun yang dirasa bisa untuk mencegah hal tersebut. Pusat dari konsep ini adalah *human security*. Konsep ini menunjukan bahwa intervensi bisa dilakukan dan berdiri bahwa kedaulatan negara itu tidak mutlak. Komunitas internasional harus bisa bertindak atas nama kemanusiaan saat ada kemungkinan terjadi pelanggaran berat terhadap kemanusiaan di suatu negara, dan negara tersebut tidak bisa mencegahnya.[[25]](#footnote-26) Walaupun konsep ini muncul dalam konteks PBB, dalam perkembangannya konsep ini penerapannya dimaksudkan lebih luas, Yaitu komunitas internasional.

 Pada dasarnya PBB mendorong munculnya konsep *regionalpeacekeeping* dikarenakan adanya perdebatan mengenal konsep perdamaian pada saat misi perdamaian terus dilakukan oleh organisasi global seperti PBB, ada beberapa perdebatan, yaitu beban misi perdamaianyang terlalu berat dibebankan kepada PBB, sensitifitas misi perdamaian dan masalah demokrasi yang pertama adalah distribusi beban yang dimaksud dengan distribusi beban adalah beban pelaksanaan misi perdamaian. Misi perdamaian adalah operasi yang mahal dan dengan berkembangnya situasi internasional. Diperlukan banyak misi perdamaian untuk mengurus konflik-konflik yang semakin banyak muncul. PBB, yang memiliki masalah pendanaan, tentu pada akhirnya tidak mampu bila harus melaksanakan semua misi perdamaian dunia. Oleh karena itu, dengan munculnya organisasi regional diharapkan dapat membantu meringankan tugas PBB dengan adanya misi perdamaian yang dilakukan oleh oraganisasi regional. Hal ini berhubungan dengan hal kedua, yaitu sensitifitas. Sensitifitas yang dimaksud adalah bagaimana misi perdamaian itu dilihat dalam konteks kondisi sosial masyarakat yang terkena konflik. perdebatan ini dapat dilihat bagaimana misi perdamaian di lakukan oleh pasukan asing dengan yang berasal dari daerahnya sendiri. Keuntungan misi perdamaian yang dilakukan oleh oraganisasi regional salah satunya adalah misi perdamaian tersebut lebih memiliki pemahaman mengenai konflik di daerahnya sendiri. hal ini dikarenakan tenaga misi perdamaian dan pihak yanng berkonflik relatif dekat dalam artian secara fisik atau secara geografis dan juga dekat secara perasaan dan juga mental. Dengan pemahaman akan konflik yang lebih, diharapkan misi perdamaian yang dilakukan dapat memiliki kemungkinan berhasil yang jauh jauh lebih besar . hal ketiga mengenai misi perdamaian oleh organisasi regional adalah masalah demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah pada saat PBB melaksanakan semua misi perdamaian, ada pandangan bahwa PBB mendominasi dan organisasi regional tidak mendapat kesempatan. Dengan adanya pembagian misi predamaian agar dilakukan oleh organisasi regional, maka unsur demokrasi dalam misi perdamaian bisa terwujud.

 Keterlibatan dari organisasi regional sudah diakomodasi oleh PBB. Sehingga sebenarnya organisasi regional ini sebagai lini depan dalam penyelesaian masalah di regional. Bila ternyata memang mengalami masalah barulah PBB berperan didalamnya. Hal ini juga berhubungan dengan masalah *peace enforcment*. Hal ini berhubungan dengan sumber daya PBB yang tidak cukup unutk membuat pasukan yang kuat, sehingga perlu adanya kerjasama organisasi regional untuk membentuk pasukan yang kuat unutk memastikan misi *peace enforcment* ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih cepat.

 Dengan demikian melalui paparan teori dan aplikasi kasus di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan organisasi internasional regional ini memiliki pendekatan sendiri mengenai masalah *peacekeeping.* Lalu dalam konsep *peacekeeping*, kita akan melihat mengenai apa saja yang telah dilaksanakan oleh AU. Kita akan melihat mengenai apa yang telah dilakukan dan bagaimana efeknya terhadap proses perdamaian. Kemudian setelah kita melihat apa yang terjadi kita akan merefleksikan kembali pada konsep *peacekeeping*yang kita gunakan sebelumnya, untuk melihat kesuksesan konsep dengan apa yang terjadi di lapangan.

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka teori dan asumsi yang di kemukakan diatas yang merupakan suatu landasan berfikir, maka penulis dapat menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

“**Dengan berperannya African Union melalui pembentukan AMISOM (*African Union Mission in Somalia*) dalam menciptakan perdamaian di Somalia dan mendukung TFG menjadikan stabilitas keamanan di Somalia terjaga dengan baik.”**

### OperasionalisasiVariabel Dan Indikator( KonsepTeoritik, Empirik Dan Analisis)

**Tabel Operasional Variabel dan Indikator :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**African Union membentuk AMISOM (*African Union Mission In Somalia*) dalam misi perdamaian di Somalia | 1. Penugasan AMISOM pada tahun 2007
2. AMISOM mendukung TFG (*Transitional Federal Government/*pemerintah resmi negera Somalia)
3. Memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan.
 | 1. TFG *( Transitional Federal Government*) mendapatkan control penuh atas bagian selatan Somalia.

<http://www.Africa-union.org/root/au/auc/>departments/psc/amisom/AMISOM\_Mandat.htm2. Pembuatan misi perdamaian atau *peacemaking*.[www.colorado.edu/confict/ peace/trearment/peacemkg.htm](http://www.colorado.edu/confict/%20peace/trearment/peacemkg.htm)3. Memberi bantuan kemanusiaan namun terhalang oleh otoritas lokal[http://www.icrc.org/eng/resources/ documments/news-release2012/somalia -news-2011-00111-12.htm](http://www.icrc.org/eng/resources/%20documments/news-release2012/somalia%20-news-2011-00111-12.htm). |
| **Variabel Terikat:**AMISOM berperan sebagai *Peace Keeping* dalam penanganan konflik internal di Somalia dan terciptanya perdamian di Somlia | 1. Konflik internal Somalia yang kompleks mengakibatkan kesengsaraan dan kelaparan pada warga sipil.
2. AMISOM berupaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk jangka waktu panjang. Stabilitas, rekontruksi dan perkembangan Somalia.
 | 1. Terbentuknya situasi yang aman di Somalia.

<http://www.Africa-union.org/root/au/auc/>departments/psc/amisom/AMISOM\_Mandat.htm1. Terciptanya perdamaian di Somalia.

<http://www.Africa-union.org/root/au/auc/>departments/psc/amisom/AMISOM\_Mandat.htm |

### Skema Kerangka Teoritis

 Adapun skema kerangka teoriti penelitian “Peran Afrika Union dalam Perdamaian

 diSomalia periode tahun 2008-2011” adalah sebagai berikut:

Konflik

InternalSomalia

AU (*African Union*)

AMISOM (*African Union Missionin Somalia*)

TFG (*Transition Federal Goverenment*) / pemerintah resmi Somalia

Mendukung TGF, Sebagai peacekeeping, Memberikan bantuan kemanusiaan

Perdamaian di Somalia

## Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1. Tingkat Analisis

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan tingkat analisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Tingkat ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

### 2. Metode Penelitian

 Dalam meneliti masalah ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif ini adalah metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemekiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam metode deskriptif dipelajari masalah-masalah yang berlalu dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukannya (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain. selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan.[[26]](#footnote-27)

### Teknik Pengumpulan Data

 Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini memakai TeknikStudi Kepustakaan (*library research*), yakni meneliti dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan penelaahan literatur baik itu data yang bersumber dari buku, jurnal, berita dari surat kabar atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[[27]](#footnote-28)

##  Lokasi dan Lamanya Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

 Guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis merencanakan akan melaksanakan penelitian di beberapa tempat yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan FISIP UNPAS Jl. Lengkong Besar no. 68, Bandung. Jawa Barat 40261

Perpustakaan UNIKOM Jl. Dipatiukur no. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Jawa Barat 40132.

### Lamanya Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Tahun** | **2017** |
| **Bulan** | **Juli** | **Agustus** | **September** | **Oktober** | **Nopember** |
| **Minggu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **TAHAP PERSIAPAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajuan judul
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perizinan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penjajagan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Studi pustaka
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Seminar outline
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TAHAP PELAKSANAAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Observasi
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengumpulan data
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TAHAP PELAPORAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengolahan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pembimbingan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perbaikan
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sidang skripsi
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakan penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, akan dipaparkan mengenai konsep organisasi internasional, organisasi regional, misi peacekeeping dan dinamika variabelnya

**BAB II : OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Berisikan uraian atau informasi umum yang dasar mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang latar belakang, akan menjelaskan mengenai masalah Somalia dan konflik Somalia, untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang ada dalam misi perdamaian AU di Somalia.

**BAB III : OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai misi perdamaian yang dilakukan oleh AU. Faktor-faktor apa saja yang menjadi isi dari misi perdamaian dan yang mempengaruhi misi perdamaian.

**BAB IV : VERIFIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan variabel terikat. Adapun isi dari bab ini ialah apa yang membuat AU relatif lebih berhasil dalam misi perdamaiannya.

**BAB V : KESIMPULAN**

Adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitia yang menunjukan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasan dan kata penutup.

1. Yussuf Kalib, Horn of Afica: Conflict and Consequences, dalam <http://www.shebacss.com/does/poey005-09.pdf>, diakses pada 5 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dalam <http://voanews.com/indonesian/news/Menlu-Somalia-Aliansi-Al-Shabb-dan-Al-Qaida-Bukan-Berita-Baru139136629.html>, Diakses pada tanggal 5 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dalam http://www.african-union.org/official\_documents/Speehes\_&\_Staements/HE\_Thabo\_Mbiki/Launch%20of%20the%2pAfrican %20Union.%209%20July2002002.htm, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-4)
4. AMISOM Mandat, dalam <http://www.afican-union.org/root/au/auc/departements/amisom/AMISOM_Mandat.htm> diakses pada tanggal 5 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-5)
5. IRIN, “Somalia:A turtous road a head in search of peace”, dalam <http://alertnet.org/thenews/newdesk/IRIN/157f219de83e61803c7259dd3c256f0fe.htm> diakses pada tanggal 5 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-6)
6. Cecilia Hull dan Emma Svensson, African Union Mission in Somalia (AMISOM) Exemplifyling African Union Peacekeeping Challenges, dalam <http://www.foi.se/upload/project/African/FOI-R--2596--SE.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dalam <http://english.aljazeerra.net/vidioafrica/2011/08/201186554>, diakses pada tanggal 6 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-8)
8. Norrie MacQueen,”*Peacekeeping and the International Systems*” 9New York:Rotledge,2006). [↑](#footnote-ref-9)
9. Dalam [http://www.un.org/Depts/DPKO/Missons/UNISOM2b.htm](http://www.un.org/Depts/DPKO/Missons/unosom2b.htm) , diakses pada tanggal 6 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-10)
10. Tony Karbo,”*peace-building in Africa”,* dalam buku David J.Francis (ed), PEACE& CONFLICT IN AFRICA (London: Zed Books,2008) hlm 113-130. [↑](#footnote-ref-11)
11. Cecilia Hull dan Emma Svensson,”*Arican Union Mission in Somalia (AMISOM) Exmplifying African Union Peacekeeing Challenges”* , dalam <http://www.foi.se/upload/project/African/FOI-R2596--SE.pdf>, diakses pada tanggal 7 mei 2017. [↑](#footnote-ref-12)
12. Tim Murithi, The African Union’s Foray into Peacekeeping: Lessons from the Hybrid Mission in Darfut,”Journal of Peace , Conflict and Davelopment, Issue 14 July 2009”, dalam <http://www.peacestudiesjournal.org.uk/Issue%2014%20Article%2015%20Revissed%20copy%20.pdf>, diakses pada tanggal 7 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-13)
13. A.J.N Judge,”Type of international Organizatio”, dalam <http://www.uia.org//uiadosc/orgtypec.htm> diakses pada 11 april 2017. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sumaryo Suryokusumo, dalam “Organisasi Internasional”, <https://id.scribd.com/mobile/document/49181828/Organisasi-Internasional> di akses pada tanggal 13 Januari 2018 [↑](#footnote-ref-15)
15. Boutros Ghali, “An Agenda for peace” dalam [www.unrol.org/files/A\_47\_277.pdf](http://www.unrol.org/files/A_47_277.pdf) , diakses pada tanggal 12 Januari 2018 [↑](#footnote-ref-16)
16. Jhon Terence O’Neil dan Nicholas Rees,” United Nations Peacekeeping in The Post Cold War”, New Work: Routledge,2005,hlm. 1-6. [↑](#footnote-ref-17)
17. “Preventive Diplomacy and Peacekeeping”,dalam [www.un.org/Docs/SG/SG-Rpt/ch46.htm](http://www.un.org/Docs/SG/SG-Rpt/ch46.htm) diakses pada 4 april 2017. [↑](#footnote-ref-18)
18. Dalam <http://www.globalsecurity.org/military/library/report/call/call_93-8_chap3.htm>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-19)
19. Conflict Research Consoortium, “ peacemaking”, dalam [www.colorado.edu/confict/peace/trearment/peacemkg.htm](http://www.colorado.edu/confict/peace/trearment/peacemkg.htm) diakses 4 april 2017. [↑](#footnote-ref-20)
20. UNITED NATIONS OPERATION IN SOMALIA, dalam <http://www.un.org/Depts/DPKO/unosomi.htm>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-21)
21. Darya Pushkina,”A Recipe for success? Ingredians of a Successsfull Peacekeeping Mission”, dalam jurnal International Peacekeeping , Vol.13, No.2, hlm, 133-149, juni,2006. [↑](#footnote-ref-22)
22. Anthony Lake, “ peacekeeping Defining Succes”, peace colloquy, No.1, 2002, hlm8-9, dalam [www.nd.edu/~krocinst/colloquy/issue1/teature.lake.html](http://www.nd.edu/~krocinst/colloquy/issue1/teature.lake.html) diakses pada 7 april 2017. [↑](#footnote-ref-23)
23. Dalam <http://walterdorn.net/36-regional-peacekeeping-is-not-the-way>, diakses pada 8 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-24)
24. Carolyn M Shaw,”Regional Peacekeeping:An Alternative to United Nations Operations?”dalam lin.unb.ca/text/JCS/Fall95/Shaw.pdf diakses pada 6 April 2017. [↑](#footnote-ref-25)
25. Vijay Meht, The UN Doctrine on the Rresponbility to Protect, dalam <http://www.unitingforpeace.com/resources/speeches/THE%20UN%20Doctrine.pdf>, diakses pada 6 april 2017. [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalla Indonesia, 1998, Hal. 23 [↑](#footnote-ref-27)
27. Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalla Indonesia, 1998, Hal.37 [↑](#footnote-ref-28)